

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. P. Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*, Bandung: Alumni, 1986.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I-Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, Ed.rev. Cet. 9, 2003.
- Dahono Fitrianto, "634 Tahun Kota Cirebon, Menemukan Kembali Makna Kota Wali", *Harian Kompas* 21 Februari 2004.
- Erman Rajagukguk. *Hukum Agraria-Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*, Cet. Pertama, Jakarta: Chandra Pratama, 1995.
- H.J De Graaf & TH. Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke V, 2003.
- Hustiati, *Agrarian reform di Philipina dan Perbandingan Dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani, Esai-Esai Sejarah*, Cet. Ketiga, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2002.
- Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Noer Fauzi, *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Ong Hok Ham, *Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Robert Van Niel. *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003.

Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Winahyu Erwiningsih. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 tahun 1961 tentang Penetapan dan Pembagian Luas Tanah Maksimum.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

## **C. Pranala lainnya**

Boedi Harsono (Ketua Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti), *Peralihan Tanah-Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja Menjadi Tanah Negara*, Makalah dalam Seminar Nasional, “Pertanahan Nasional Berkenaan Dengan Tanah-Tanah Eks Swapraja”, Cirebon, 15 Februari 2003.

Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cet. Keempat, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

<http://kandaga.unpad.ac.id/Record/IOS1.20358/TOC>

P.R. Arief, “Keraton Hanya Meluruskan” (Soal Tuntutan Tanah Milik Keraton Kasepuhan), Radar Cirebon, 20 Januari 2003.

*Sejarah Kasultanan Kasepuhan Tidak Pernah Menjadi Daerah Swapraja*, Disajikan Untuk Tim Peneliti dan Investigasi Masalah Tanah Keraton Kasepuhan Di Kota Cirebon, Keraton Kasepuhan, tanpa tanggal Maret 2001.

Walikota Cirebon, *Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) di Kota Cirebon (Studi Kasus Tanah-Tanah Swapraja/Bekas Swapraja di Kota Cirebon)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanahan; Pertanahan Nasional Berkenaan Dengan Tanah-Tanah Eks Swapraja, 15 Februari 2003.

